

BAB IV

ANALISA KONFLIK SURIAH

Pemberontak di suatu Negara dapat di jelaskan dengan mengkaji siapa yang memiliki atau tidak memiliki kemauan untuk memberontak melawan kelompok yang berkuasa. Begitupun di Suriah, pemberontakan dapat dikaji melalui seberapa besar kemauan oposisi rezim Al- Assad untuk turun tangan melawan rezim yang sedang berkuasa tersebut.

Arab Spring yang melanda Negara-negara Timur Tengah telah memberikan dampak yang luar biasa bagi keadaan sosial maupun politik bagi Suriah. Kondisi saat pemerintah tidak lagi mendapatkan kedaulatan dari rakyatnya karena ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah akibat terjadinya korupsi, kesewenangan dalam menegakan peraturan, dan tingginya kesenjangan sosial, telah mendorong rakyat untuk berusaha menggulingkan pemerintahan yang ada dan menggantinya dengan yang baru, ternyata tidak serta membuat Suriah kembali ke kondisi normal. Gelombang yang di mulai pada Desember 2010 di Negara Tunisia dan kemudian menjalar ke Negara Timur Tengah lainnya. Kemudian gelombang Arab Spring tersebut memberi dampak bagi Suriah yaitu berupa kekesalan rakyat Suriah atas rezim Bashar al- Assad yang sudah terlalu lama memimpin. Semua itu merupakan hasil dari sebuah proses panjang atas kebijakan-kebijakan pemerintah Suriah terhadap rakyatnya.

Pada bab ini akan menjelaskan dinamika konflik Suriah dan rentetan peningkatan konflik yang, dari tahun ke tahun semakin meningkat.

A. Terjadinya Konflik Suriah

Gelombang Arab Spring yang dengan cepat menyebar melalui dunia maya, menyadarkan Negara-negara lain bahwa otoritarianisme sudah tidak lagi relevan dengan keadaan sosial dan politik saat ini. Gelombang demokrasi yang semakin keras di suarakan oleh aktivis-aktivis pro demokrasi dan dengan cepat menyebar melalui internet. Upaya penyebaran revolusi Arab Spring melalui internet sudah dilakukan oleh aktivis-aktivis pembebasan Tunisia dan Mesir pada saat gelombang protes di kedua Negara tersebut berlangsung. Mereka seolah ingin menyadarkan rakyat Suriah untuk bangun dan bergerak melawan rezim otoriter.

Pada awal Februari 2011, situs-situs sosial media seperti Facebook, Twitter di dalam maupun luar Suriah menyerukan dilakukannya demonstrasi besar-besaran di seluruh Suriah pada tanggal 4 dan 5 Februari 2011 untuk menuntut pemerintah segera melakukan reformasi. Para aktivis pro-demokrasi Tunisia dan Mesir mengirim sebuah paket modem satelit, telepon seluler computer, dan alat sosial media lainnya sebagai persiapan bila peristiwa besar seperti Tunisia dan Mesir terjadi. (Kuncayono, Musim Semi di Suriah : Anak-anak Sekolah Penyulut Revolusi, hal. 97). Namun, menjelang hari tersebut para aktivis dihubungi dan diancam oleh intel dan pasukan keamanan untuk tidak melakukan demonstrasi tersebut. Tanggal yang di tentukan oleh aktivis di luar Suriah, 4 dan 5 Februari

2011, mengingatkan mereka akan tragedi pemberontakan Ikhwanul Muslimin pada tahun 1982 di Hama. (1982: Syria's President Hafez al- Assad crushes renellion in Hama). Tregedi tersebut membuat akativis pro demokrasi di Suriah enggan melakukan demonstrasi karena yang mereka inginkan adalah perubahan secara damai, bukan perang saudara.

Namun, saat terjadi penahan terhadap kelima belas anak-anak sekolah yang menulis *graffiti* “ *Ash-sha'b vurid isqat an- nizam*” (Raktay ingin menumbangkan rezim ini) segalanya berubah. (“Arab Spring”). Demonstrasi untuk menuntut keadilan kepada gubernur kota Deraa, Faisal Kalthoum dijawab dengan tindakan represif dari aparat keamanan. Situasi semakin keruh saat aparat keamanan menembaki para demonstan dengan senjata api. Insiden tersebut menimbulkan korban jiwa dari pihak demonstan.

Sejak anak-anak tersebut ditahan oleh aparat keamanan, demonstrasi terus terjadi. Demonstan yang dilakukan kemudian tidak hanya menuntut pembebasan anak-anak tersebut, namun juga menuntut kebebasan politik. Para demonstan yang turun ke jalan tidak di dengar aspirasinya dan dihadang kembali oleh petugas keamanan. Namaun, mereka tetap melakukan demonstrasi.

Setelah keinginan para demonstan semakin beragam, pemerintah pusat mulai turun tangan. Bashar al-Assad mengirimkan delegasinya yang berasal dari kota Deraa untuk menemui keluarga anak-anak yang ditahan tersebut. Jendral Rustom Ghazali, salah satu Intelijen Militer Suriah, menjamin kepada para penduduk kota

tersebut bahwa keadaan akan kembali seperti sedia kala dan anak-anak yang ditahan oleh aparat keamanan akan segera dibebaskan. Aparat keamanan yang telah bertindak brutal pun akan di berikan sanksi.

Anak- anak yang dibebaskan ternyata mendapat penyiksaan dari petugas keamanan selama dalam tahanan dan hal tersebut membuat keluarga mereka marah dan memicu demonstrasi yang lebih besar. Rakyat yang akan berdemo memilih masjid sebagai tempat untuk berkumpul dan menyusun rencana, karena hanya masjid tempat yang tidak dicurigai sebagai tempat berkumpul.

Pasukan pengamanan pemerintah kota Deraa menyerang masjid yang biasa dijadikan tempat berkumpul sebelum demonstrasi, Masjid Omari yang berada tepat di jantung kota Deraa. Pasuka pengamanan tersebut menembaki orang-orang yang ada di dalam masjid. Penyerangan tersebut membuat graffiti-graffiti anti rezim semakin banyak dan tulisan pada graffiti pun semakin beragam seperti “ Turunkan Rezim yang Korup”.

Upacara penguburan orang-orang yang menjadi korban penembakan di dalam Masjid Omari dijadikan momentum untuk mengungkapkan kekecewaan serta perlawanan terhadap rezim. Dari situ demonstrasi lahir semakin membesar dan mulai merambat ke daerah lain termasuk dua kota terbesar di Suriah, Damaskus dan Aleppo.

B. Faktor-faktor pemicu eskalasi konflik Suriah

Rentetan masalah akaibat dari berbagai kebijakan pemerintah Suriah, baik selama pemerintahan Hafiz al- Assad maupun Bashar al- Assad, telah melahirkan sebuah gelombang revolusi di Suriah. Berikut peneliti akan membahas masalah apa saja sehingga adanya peningkatan konflik. Suriah yang dianggap imun dari revolusi, justru menjadi Negara yang paling lama mengalami perpecahan dan pemberontakan.

1. Kesenjangan Ekonomi

Perekonomian Suriah berada di bawah Negara- Negara di sekitarnya dan di tambah dengan persoalan seperti korupsi, kelebihan tenaga kerja yang melebihi jumlah lapangan kerja dan tidak tepat guna dalam mengelola keuangan Negara. Pendapatan perkapita Suriah sekitar 1.000 dollar, tertinggal jauh dengan Lebanon yang mencapai angka 3.000 dollar dan Israel 17.000 dollar. Pengangguran diperkirakan berjumlah 22% dan Negara membelanjakan lebih dari 7% dari PNB dan 50% dari anggaran adalah untuk pembiayaan militer dan pasukan keamanan. Hal tersebut diperparah dengan terbatasnya sumber daya alam, jumlah militer yang terlalu besar, berkurangnya bantuan luar negeri, korupsi, dan pertumbuhan penduduk yang tinggi yaitu sekitar 3,15%. (Nadjib Ghadbian “ The new Assad Dynamics of Continuity and Change in Syria”. Hal 634).

Banyak industri-industri produktif yang belumnya mampu menyerap banyak tenaga kerja muda, di bongkar pada saat Bashar al- Assad memerintah, sehingga

memperbanyak pengangguran pada usia kerja. Perekonomian diubah menjadi perokonomian rente yang di kontrol dan di kuasai oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan rezim yang berkuasa. Sebanyak 81% lulusan perguruan tinggi membutuhkan waktu paling kurang empat tahun untuk mendapatkan pekerjaan pertama mereka.

Pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan sumber daya alam yang semakin menipis. Produksi minyak perhari pada tahun 2010 hanya 385.000 barrel, jauh di bawah tahun 1996 yaitu 583.000 barrel. (Kuncahyono, *Muslim Semi di Suriah: Anak- anak Sekolah Penyulut Revolusi*,hal 88).

2. Krisis Kesetiaan terhadap Rezim Bashar al- Assad

Krisis kesetiaan merupakan ketidak percayaan masyarakat terhadap rezim Bashar al-Assad. Menurut rakyat Suriah pada rezim Bashar al- Assad karena kebijakan al-Assad yang kontroversial dan banyak terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang sangat kerap terjadi dalam model pemerintahan monarki authoritarianisme karena ekonomi di Suriah di hanya di kuasai oleh oknum- oknum Bashar al- Assad. Rendahnya daya pantau masyarakat akan hal ini membuat demokrasi menjadi hal mutlak sebagai tuntutan masyarakat Suriah. Selain itu, maraknya praktik KKN juga memberikan imbas yang cukup signifikan bagi kehidupan masyarakat bawah. KKN menyebabkan sistem ekonomi rapuh, sehingga yang terjadi adalah diantaranya, tingginya harga barang-barang pokok dan

banyaknya pengangguran dikarenakan lapangan kerja yang sedikit, secara implisit menjadi hal yang dapat dikaitkan dengan globalisasi negara-negara Barat, yang dimotori oleh Amerika Serikat. Memang, berkembangnya sistem informasi turut membawa serta ide-ide kebebasan sehingga masyarakat Suriah ikut serta memantau jalannya pemerintahan secara langsung.

3. Bertahannya Rezim Bashar al-Assad

Bertahannya rezim Bashar al-Assad, merupakan faktor penting dalam konflik Suriah, dimana konflik Suriah tidak kunjung usai hingga saat ini. Hal ini terjadi, karena presiden Bashar al-Assad tidak mau turun dari kasta kekuasaannya, hal tersebut di dukung dan diperkuat oleh dua Negara besar yaitu Rusia dan Iran. Pertama, intervensi militer Rusia menempatkan Presiden Bashar Assad dalam posisi unggul untuk pertamakalinya sejak bertahun-tahun. Sementara perundingan damai di Jenewa menemui jalan buntu. Presiden Rusia, Vladimir Putin juga telah menekankan pihaknya akan mempertahankan kekuasaan Bashar al Assad. Sikap tersebut selaras dengan kebijakan Timur Tengah ala Rusia dan akan memperkuat hubungan antara Rusia, Iran dan Suriah.

4. Intervensi Asing

Di dalam konflik Suriah adanya intervensi Asing, dan membentuk kelompok Negara yang pro dengan pemerintahan Bashar al- Assad seperti Rusia dan Iran di ketuai oleh Rusia, dan ada kelompok Negara yang oposisi dengan pemerintahan rezim al- Assad seperti Amerika, Arab Saudi, Turki, dan Irak yang di ketuai oleh

Amerika. Negara-negara di kawasan maupun non kawasan memanfaatkan Suriah sebagai lahan proxy war oleh Negara- Negara barat seperti Amerika dan Rusia di karenakan untuk sebuah kepentingan ideologi dan sumber energi. Hal ini dikarenakan Proxy war terhadap Suriah diiringi dengan kebijakan konsisten Amerika Serikat yang telah mendominasi energi kaya Timur Tengah, apalagi sejak Amerika Serikat mampu menerapkan pressure terhadap minyak produksi yang akan dijual dalam bentuk dollar Amerika Serikat sehingga memperkuat mata uang mereka, juga sangat tergantung pada kekuatan mereka untuk memproyeksikan kekuatan militer, sebagaimana telah terbukti oleh konsentrasi berat pangkalan militer di Timur Tengah. Sebagaimana pada akhirnya, pemerintahan seperti Iran dan Suriah yang menolak bekerja sama dengan desain Amerika Serikat dengan membentuk pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah otoritas mereka.

Namun Amerika Serikat tidak selalu berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, misalnya invasi ke Irak, yang seharusnya bisa mengontrol penuh atas sumber minyak penting, tapi karena musuh Saddam Hussein merupakan sekutu alami Iran, dengan demikian Irak akan bergerak ke ranah pengaruh Iran. Tampaknya jadi motivasi penting bagi Amerika Serikat yang notabene sekutunya Arab Saudi dan Qatar yang juga memiliki alasan tersendiri untuk melemahkan Iran. Meskipun Suriah bukanlah produsen utama minyak, satu penjelasan tertentu yang mempertimbangkan mengapa Suriah menjadi target adalah penemuan pada tahun 2007 cadangan gas alam terbesar yang diketahui berada di Teluk Persia, yang mana kemudian dibagi antara Iran dan Qatar. Iran kemudian meluncurkan proyek PARS

Pipeline, yang mengarah pada pembangunan pipa dari Teluk Persia, melalui Irak, dan berakhir di pantai Mediterania Suriah. Masalah perang proxy ini kian bertambah dengan munculnya kelompok jihad seperti Islamic State membuat konflik Suriah semakin bertambah kompleks, karena di balik datangnya ISIS ada suatu actor yang mendalangnya.

C. Oposisi Pemerintah Suriah pasca Arab Spring.

Kelompok oposisi telah hadir untuk menggulingkan pemerintahan rezim Bashar al- Assad, untuk demokrasi yang lebih baik.

1. Free Syrian Army (FSA) adalah salah satu oposisi yang berperang melawan pemerintah Suriah. Kelompok ini dipimpin oleh adik dari Hafiz al-Assad, Rifad al-Assad, yang pada masa pemerintahan Hafiz al-Assad juga sempat melakukan kudeta namun gagal. Kelompok ini mendeklarasikan diri sebagai oposisi melawan pemerintah pada Juli 2011. (Philip Gamaghelyan “A Caution against Framing Syria as an Assad – Opposition Dichotomy” (2013) hal. 104.)
2. Ikhwanul Muslimin yang sudah memberontak pada akhir 1970 dan awal 1980an. Keberadaan dan keanggotaan kelompok tersebut sudah dilarang oleh pemerintah Suriah terutama sejak tragedi Hama pada Februari 1982. Kelompok tersebut dipimpin oleh Ali Sadreddine al- Bayanouni.
3. Front Penyelamatan Nasional (*National Salvation Front/NFS*) yang sebagian anggotanya juga merupakan anggota kelompok Ikhwanul Muslimin. Kelompok ini dipimpin oleh mantan wakil Presiden Abdul Halim Khaddam.

4. *National Democratic Gathering* (NDG) yang ikut memimpin demonstrasi tahun 1970an. Kemudian para ketua kelompok tersebut dijadikan tahanan politik (tapol) saat Hafiz al-Assad masih menjabat sebagai Presiden, dan kembali lagi memimpin aksi masa pada pergolakan Suriah tahun 2011. Kelompok tersebut merupakan koalisi politik secular yang dibentuk pada akhir tahun 1979 oleh lima partai berhaluan nasionalis dan kiri illegal yaitu, Uni Sosialis Arab Demokratik, Partai Rakyat Demokratik Suriah, Gerakan Sosialis Arab, Partai Revolusioner Buru Partai Sosialis Arab Ba'ath Demokratik, dan Partai Aksi Komunis.
5. Jabhah al-Nusrah. Kelompok ini disebut sebagai kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. Kelompok ini ingin mendirikan khilafah Islam setelah tumbangnya Bashar al- Assad.

